

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN MALINAU**

Frent Tomi Lukas; Sri Mintarti; Priyagus
Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman
Samarinda Kalimantan Timur

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of workforce and government investment in the forestry sector along with Industrial Sector towards Economic Development of Forestry Sector in Malinau Regency. Data collection was conducted in Malinau regency with 10 years' worth of data from 2004 towards 2013, with multiple regression analysis. This study shows that workforce and government investment in forestry sector, along with industrial sector are simultaneously affecting the economic growth of forestry sector in Malinau regency. Partial result shows that workforce and industrial sector has positive significant effect towards the economic growth in forestry sector, but government investment has positive insignificant effect towards the economic growth in forestry sector in Malinau regency.

Keywords: workforce; government investment; industries; economic growth.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran penting bagi setiap umat dunia Internasional. Hutan merupakan sumber daya hutan yang dapat memulihkan diri selama pemanfaatannya tidak melampaui daya pulihnya, sehingga manfaat ganda dari hutan akan terus mengalir selama keberadaan dan fungsinya tetap terjamin. Adanya pergeseran paradigma pembangunan kehutanan, perlu secara tegas pengaturan prinsip hubungan negara dan masyarakat, hubungan ekonomi dan ekologi dan hubungan manusia dan biosfer, agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi untuk menciptakan keberlanjutan kehidupan serta manusia dan biosfer merupakan kesatuan dalam alam melalui interaksi yang sinergis.

Langkah menuju pengelolaan hutan oleh masyarakat yang mandiri perlu persiapan serius. Persoalannya pengelolaan hutan yang lestari memerlukan penguasaan teknik *silviculture* yang baik di samping modal dan kemampuan manajemen. Kearifan tradisional yang sudah dimiliki masyarakat dijadikan aset untuk dikembangkan dan diintegrasikan dengan

sistem agribisnis dengan tetap memegang teguh prinsip *maximum and sustained principle*, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan, langkah yang dilakukan adalah antara lain membangun kelompok atau unit organisasi dalam suatu wadah untuk semua kepentingan anggota masyarakatnya. Kelompok ini dibangun anggotanya sendiri, dibimbing atau difasilitasi pemerintah atau lembaga lain, sehingga mandiri dan solid. Hanya dengan kekuatan dan kemampuan kelompok *sustainable forest* dapat diwujudkan kesejahteraan anggota masyarakat. Berbicara masalah pengelolaan hutan secara ekonomi tidak terlepas dari peran serta Modal Pemerintah dan Swasta serta penyediaan Tenaga Kerja yang bergerak langsung dalam Proses Pengelolaan Hasil Hutan tersebut. Kegiatan ini meliputi penebangan dan pemotongan segala jenis kayu, pengambilan hasil Hutan dan Perburuan Binatang Liar yang meliputi kayu bundar, rotan, damar, sarang burung, kulit reptil dan hasil hutan lainnya. Berikut akan dijelaskan nilai tenaga kerja, investasi pemerintah serta pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan kabupaten Malinau:

Tabel 1.1
Nilai Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah Serta Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Malinau (Tahun 2003-2013)

| No. | Tahun | Tenaga Kerja (Jiwa) | Investasi Pemerintah Sektor Kehutanan (Miliar) | Sektor Industri (Miliar) | Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kehutanan (%) |
|-----|-------|---------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2003 | 459 | 1.494.882 | 258,22 | - |
| 2 | 2004 | 551 | 5.676.150 | 271,08 | 2,01 |
| 3 | 2005 | 774 | 1.533.075 | 383,62 | 2,83 |
| 4 | 2006 | 867 | 1.369.358 | 450,17 | 1,51 |
| 5 | 2007 | 1.037 | 5.718.683 | 490,01 | 3,96 |
| 6 | 2008 | 1.187 | 7.979.616 | 540,77 | 3,63 |
| 7 | 2009 | 1.274 | 11.039.618 | 584,37 | 2,73 |
| 8 | 2010 | 1.467 | 7.686.471 | 627,81 | 2,59 |
| 9 | 2011 | 1.668 | 2.562.429 | 703,00 | 4,01 |
| 10 | 2012 | 1.746 | 2.325.866 | 747,09 | 2,99 |
| 11 | 2013 | 2.032 | 1.046.328 | 746,43 | 2,08 |

Sumber: BPS Malinau

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa masing-masing nilai jumlah tenaga kerja, investasi serta pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan Kabupaten Malinau periode tahun 2003 – 2013 menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan Kabupaten Malinau setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi keadaan sebenarnya penyerapan tenaga kerja sektor Kehutanan masih rendah, nilai menunjukkan masih fluktuatif.
2. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan Kabupaten Malinau tidak dibarengi dengan meningkatnya nilai investasi pemerintah Kabupaten Malinau, karna terlihat nilai di setiap tahunnya mengalami nilai yang fluktuasi, seharusnya dengan adanya investasi pemerintah akan dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat terserapnya tenaga kerja di Kabupaten Malinau.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa peningkatan tenaga kerja dan industri tidak diikuti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Demikian juga jika dilihat dari data investasi dan pertumbuhan ekonomi yang

fluktuatif. Fenomena yang demikian maka perlu dilakukan pengkajian secara empiris terhadap pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di kabupaten Malinau.

Boediono (1992:81), menyatakan bahwa meningkatkan *output* sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pekerja, penerapan sistem pembagian kerja yang tepat berdasarkan keterampilan pekerja dan penggunaan mesin-mesin yang dapat memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lebih lanjut mengemukakan bahwa empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia, (2) pertumbuhan penduduk, (3) kemajuan teknologi, dan (4) sumber daya institusi (sistem kelembagaan).

Berdasarkan fenomena dan pendapat yang telah dikemukakan pada latar belakang maka penulis melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kehutanan Di Kabupaten Malinau”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah tenaga kerja subsektor Kehutanan, investasi Pemerintah sektor Kehutanan serta sektor Industri secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau?
2. Apakah tenaga kerja subsektor Kehutanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau?
3. Apakah investasi Pemerintah sektor kehutanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau?
4. Apakah sektor Industri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau?
5. Manakah dari ketiga variabel tersebut yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tenaga kerja subsektor Kehutanan, investasi Pemerintah sektor kehutanan serta sektor Industri secara bersama-sama (simultan) terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau.
2. Menganalisis pengaruh tenaga kerja subsektor Kehutanan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.
3. Menganalisis pengaruh investasi Pemerintah sektor kehutanan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau.
4. Menganalisis pengaruh sektor Industri secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau.

5. Menganalisis pengaruh variabel tersebut yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan di Kabupaten Malinau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang menuntut adanya kemampuan dalam melakukan perencanaan kebijakan pembangunannya yang lebih mandiri terutama terfokus pada subsektor Kehutanan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai kajian pertumbuhan ekonomi pada subsektor Kehutanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Pembangunan regional pada dasarnya adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set (gugus) variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (*factor returns*) dalam daerah di batasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya di ukur menurut *output* atau tingkat pendapatan.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita 2005 dalam Manik, 2009:32).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005:46).

Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000:43).

Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (2001:89), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Spencer (dalam Winardi, 2001:184), Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dalam *output* nyata atau pendapatan sebuah perekonomian dengan berlangsungnya waktu maksudnya kenaikan dalam *output* "full employment" dengan harga-harga konstan.

2.3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Analisis tradisional terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu non kerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangkan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan (Tambunan, 2001a).

Ekonom memandang bahwa waktu senggang merupakan kebutuhan pokok manusia, sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan *leisure*. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena *leisure* juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat *backward bending* (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam *leisure*-nya (untuk mengurus keluarga dan sebagainya).

Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi pembayaran luar negeri (Makmun, 2004). Secara nasional data menunjukkan bahwa lumpuhnya ekonomi wilayah industri di perkotaan menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan dan meningkatnya pengangguran sebagai akibat meningkatnya migran pulang ke desa. Menurunnya laju perekonomian di desa dan bertambahnya jumlah tenaga kerja di desa

serta meningkatnya harga konsumsi dan biaya produksi di bidang pertanian jelas akan mengurangi kapasitas produksi pertanian yang dihasilkan.

2.4. Teori Investasi Pemerintah

Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu wilayah/daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya investasi di suatu negara/daerah menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian dan produktivitas dan hal ini akan terlihat jelas dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal menurut Sukirno (2000) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat".

Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

2.5. Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Semua kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, merupakan investasi. Sebagaimana diketahui bahwa investasi setidaknya ada dua jenis, yaitu bersifat mengganti yang susut dan yang bersifat menambah kapasitas. Selain investasi dalam bidang infrastruktur fisik (jalan raya, pabrik), pemerintah juga membangun infrastruktur bukan fisik yang disebut infrastruktur kelembagaan. Dalam infrastruktur bukan fisik antara lain termasuk penetapan berbagai kebijakan, baik yang bersifat umum seperti kebijakan moneter, maupun bersifat khusus seperti kebijakan di bidang perdagangan ataupun ketenagakerjaan (Muljana, 1995).

Investasi secara umum di sektor perekonomian sangat dibutuhkan untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang karena mereka belum mampu membentuk modal sendiri sehingga harus ada bantuan dari luar negeri. Setiap kenaikan jumlah dari pendapatan sebagai akibat dari penambahan investasi akan meningkatkan pendapatan dengan jumlah yang berlipat. Peningkatan pendapatan ini khususnya dalam bentuk uang yang akan meningkatkan permintaan barang secara agregat atau Agregat *demand* yang mana berpengaruh pada kebutuhan peralatan maupun uang dalam bentuk modal sebagai akibat dari peningkatan produksi, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan investasi.

2.6. Teori Industrialisasi

Industrialisasi di setiap negara mempunyai corak yang berbeda-beda, dalam implementasinya ada empat teori yang dilaksanakan oleh beberapa negara yang melandasi industrialisasinya (Dumairy, 2001). Program dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi program prioritas yaitu: 1) Program Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas, dan Bahan Tambang Mineral. 2) Program Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik, dan Ekspor. 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan lain sebagainya.

Apabila berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan sektor industri seperti penyediaan infrastruktur, ketersediaan gas, listrik dan iklim investasi yang kondusif dapat ditemukan solusinya, maka sektor industri di yakini dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan industri karena hampir seluruh negara memajukan industri untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi, nilai guna, dan daya saing terhadap negara-negara di sekitarnya (Atahrim, 2013). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peran pemerintah terhadap pengembangan industri di Indonesia masih

minim. Hal ini, dibuktikan dengan banyaknya pertentangan pada perizinan.

2.7. Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan industri karena hampir seluruh negara memajukan industri untuk meningkatkan efisiensi yang tinggi, nilai guna, dan daya saing terhadap negara-negara di sekitarnya (Atahrim, 2013). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peran pemerintah terhadap pengembangan industri di Indonesia masih minim. Hal ini, dibuktikan dengan banyaknya pertentangan pada perizinan. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Budhi Setyanto, peran pemerintah dalam pengembangan kawasan Industri hanya 6 persen, sedangkan swasta 94 persen (Rezy, 2013).

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

2.8. Ekonomi Sumber Daya Kehutanan

Dalam perekonomian, hutan dapat dianggap sebagai sumber daya yang dapat menyediakan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan hutan di suatu wilayah telah menjadikan hutan sebagai sumber daya utama dalam pembangunan ekonomi. Pengelolaan hutan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Barang yang dapat disediakan oleh hutan antara lain kayu, getah, rotan, daun, makanan ternak dan lain-lain. Sedangkan jasa dari hutan antara lain berupa komoditi air/ tata air, tempat

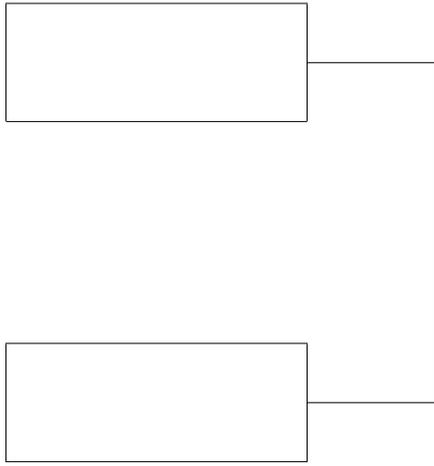
rekreasi, plasma nutfah, pendidikan dan sebagainya. Lebih lanjut menurut World Bank (1978), barang dan jasa dari hutan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu barang dan jasa untuk konsumsi, bahan industri, dan yang berpengaruh terhadap ekologi. Barang dan jasa untuk konsumsi bersifat *indigenous* meliputi kayu untuk bangunan tempat tinggal (*building poles*), kayu bakar "rencek" dan arang kayu (*fuelwood and charcoal*), bahan-bahan anyaman (*weaving materials*), dan kayu-kayu spesial (*special woods and ashes*).

Barang untuk kegunaan sumber bahan industri meliputi bahan ekstraktif (*gums, resins and oils*), kayu bulat (*logs*) untuk pengergajian, kayu bahan pulp dan kertas (*pulp woods*), plywood atau kayu lapis dan kayu limbah (*waste*) untuk *particle board, fibre board* dan *wastepaper*. Sedangkan barang dan jasa yang berpengaruh terhadap ekologi meliputi perlindungan terhadap daerah aliran sungai atau perlindungan terhadap daya tangkap (*cathment protection*), ekologi dan konservasi satwa liar (*ecology and wildlife conservation*) dan pengendalian erosi tanah (*soil erosion control*). Pada awalnya, sumber daya hutan dapat diperoleh di alam bebas dengan mudah karena adanya sifat *open acces* pada hak penguasaan (*property rights*) hutan oleh masyarakat di sekitar hutan. Namun karena luasnya manfaat dari hutan maka lambat laun sumber daya hutan tersebut semakin berkurang karena terus menerus dieksploitasi, sehingga mengalami kerusakan sumber daya alam.

Untuk memperkecil tingkat kerusakan tersebut, maka sumber daya hutan tersebut dikelola oleh pemerintah atau diserahkan pengolahannya kepada pihak badan hukum swasta, koperasi dan bahkan perorangan. Untuk itu pemerintah memberlakukan *royalty* atau *rent* kepada pengelola tersebut sebagai nilai sewa ekonomi atau harga sumber daya dalam persediaan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

2.9. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan dasar teori maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian

2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Tenaga kerja subsektor Kehutanan, investasi Pemerintah pada Subsektor Kehutanan serta sektor Industri secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.
2. Tenaga kerja subsektor Kehutanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.
3. Investasi Pemerintah sektor Kehutanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.
4. Sektor Industri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.
5. Tenaga kerja sektor kehutanan berpengaruh dominan terhadap Pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yang menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel yang digunakan adalah variabel tenaga kerja

subsektor Kehutanan, Investasi Pemerintah subsektor Kehutanan dan sektor Industri serta pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan Kabupaten Malinau.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas (*dependent variable*) dan variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*).

1. Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Kehutanan (Y)

Variabel Pertumbuhan Ekonomi subsektor Kehutanan dalam penelitian ini adalah nilai PDRB sektor kehutanan di Kabupaten Malinau berdasarkan harga konstan. Indikator untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan nilai tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya yaitu PDRB riil sub sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau dari tahun 2004 sampai 2013 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

2. Variabel Tenaga Kerja (X1)

Tenaga Kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja atau terserap di sub sektor Kehutanan di Kabupaten Malinau sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja (orang) yang bekerja di sektor

Kehutanan setiap tahun mulai dari tahun 2004 sampai 2013.

3. Investasi Pemerintah (X2)

Investasi Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di sektor kehutanan di Kabupaten Malinau. Indikator untuk mengukur nilai rupiah akumulasi pengeluaran setiap tahunnya sejak tahun 2004 hingga tahun 2013.

4. Sektor Industri (X3)

Sektor industri dalam penelitian ini adalah nilai tambah hasil kegiatan sektor industri atau sub sektor industri rumahan serta perusahaan. Indikatornya adalah hasil nilai tambah dari industri selama tahun 2004 hingga tahun 2013 dalam rupiah.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, penelitian, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data yang digunakan dikumpulkan secara runtut waktu (*time series*) dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Data mengenai besarnya pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan periode waktu tahun 2004 hingga tahun 2013.
2. Data mengenai jumlah tenaga kerja pada subsektor kehutanan di Kabupaten Malinau pada periode tahun 2004 hingga tahun 2013.
3. Data mengenai besarnya investasi pemerintah Kabupaten Malinau pada subsektor kehutanan tahun 2004 hingga tahun 2013.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan - catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait. Data yang akan dikumpulkan diperoleh dari dinas/lembaga/kantor seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau.

3.5. Metode Analisis

1. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap perubahan suatu variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji model pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan di Kabupaten Malinau. Adapun langkah – langkah dalam pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi (uji R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi (R²).

Koefisien determinasi (R²) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2007:32).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel.

c. Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:42). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu.

2. Uji Asumsi Klasik

Beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dalam buku teks ekonometrikah termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya

masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas (Kuncoro, 2004:42). Pengujian asumsi klasik meliputi sebagai berikut:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan (independen) dari model regresi (Gujarati, 1997:157). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2005).

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1997: 201). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2005 : 95). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Hanke dan Reitsch (1998:259) heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi lainnya (Kuncoro, 2004). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain konstan, maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2005 : 105).

Untuk lebih mempermudah serta mempercepat proses analisis ini dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dipergunakan sistem komputerisasi dengan mempergunakan program SPSS v.20.

IV. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Sub Sektor Kehutanan Di Kabupaten Malinau

Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ikut memacu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Perkembangan PDRB Kabupaten Malinau selama tahun 2004 – 2013 mengalami peningkatan begitu juga terhadap pertumbuhannya positif walaupun.

Tabel 4.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Sektor Kehutanan
di Kabupaten Malinau Tahun 2004 – 2013

Tahun

Pertumbuhan

Pertumbuhan

| | Kehutanan | PDRB Kab. |
|------|------------------|------------------|
| 2004 | 2,01 | 1,24 |
| 2005 | 2,83 | 3,36 |
| 2006 | 1,51 | 3,07 |
| 2007 | 3,96 | 6,31 |
| 2008 | 3,63 | 8,03 |
| 2009 | 2,73 | 8,95 |
| 2010 | 2,59 | 14,27 |
| 2011 | 4,01 | 11,25 |
| 2012 | 2,99 | 11,80 |
| 2013 | 2,08 | 9,03 |

Sumber: BPS dan Dishut Malinau, 2016

4.2. Investasi Pemerintah Sektor Kehutanan

Investasi pemerintah berbeda dengan investasi swasta, karena investasi pemerintah tidak berdasarkan motif laba tetapi terutama memikirkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pada investasi di bidang "Overhead Capital" seperti jalan-jalan, pelabuhan, pengairan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Bahkan pada perusahaan-perusahaan negara pun, walaupun memperhatikan juga efisiensi ekonomis, namun pertimbangan-pertimbangan laba tidak didahulukan dari kepentingan umum seperti pada perusahaan swasta. Dengan demikian semua Pengeluaran Pembangunan atau sekarang dikatakan sebagai Belanja Publik merupakan Investasi Pemerintah.

Anggaran sektor kehutanan manfaat kebijakan anggaran untuk pemanfaatan hutan dan pelestariannya. Kebijakan pemanfaatan hutan alam bertujuan untuk:

1. Menghasilkan devisa melalui ekspor kayu bulat yang diproduksi (dibutuhkan untuk

memperbaiki perekonomian yang sedang *downturn*).

2. Menyerap tenaga kerja (pertumbuhan penduduk jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi), dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (ketersediaan investasi untuk pengembangan ekonomi daerah terbatas).

Kebijakan pemanfaatan hutan alam telah berhasil meningkatkan devisa, penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dibalik keberhasilannya, dampak kebijakan yang diterapkan membawa persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Akhir-akhir ini, banyak pihak mulai mengkhawatirkan terjadinya penurunan potensi produksi hutan tersebut dan menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian pemerintah berkewajiban melakukan pengalokasian anggaran untuk perbaikan kawasan hutan untuk kelayakan hidup masyarakat.

Tabel 4.2
Investasi Pemerintah Sub Sektor Kehutanan Kabupaten Malinau tahun 2004 - 2013

| Tahun | Sub Sektor Kehutanan Kab. Malinau (Miliar Rp) |
|--------------|--|
| 2004 | 4.181,50 |
| 2005 | 6.062,90 |
| 2006 | 21.710,90 |
| 2007 | 22.455,70 |
| 2008 | 23.924,30 |
| 2009 | 32.722,90 |
| 2010 | 34.183,10 |
| 2011 | 45.446,60 |
| 2012 | 40.120,00 |
| 2013 | 45.980,60 |

Sumber: BPS, Dishut Kabupaten Malinau, 2016

Kontribusi sektor kehutanan dan industri turunannya terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pemulihan krisis ekonomi akan sangat banyak apabila seluruh potensi yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Akan tetapi pada saat ini sektor kehutanan mengalami penurunan kualitas hutan secara drastis yang diakibatkan antara lain eksploitasi hutan yang berlebihan, konversi/pembukaan kawasan hutan untuk peruntukan lain dan bencana alam seperti kebakaran hutan.

4.3. Tenaga Kerja Sektor Kehutanan

Keadaan ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Malinau dapat juga dilihat pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam bentuk persentase.

Semakin tinggi nilai persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), semakin besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam angkatan kerja, begitu pula sebaliknya.

Maraknya kegiatan *illegal logging* antara lain disebabkan oleh lebarnya kesenjangan antara kapasitas industri dengan ketersediaan bahan baku, hal ini merupakan dampak dari kebijakan pengurangan jatah tebangan tahunan secara nasional (*soft landing*). Dengan kondisi tersebut, memang masih terasa beberapa aktivitas kehutanan khususnya pada sektor Hutan Tanaman industri dan Pembukaan Lahan untuk Perkebunan dan Pemanfaatan hasil hutan lainnya.

Berikut ini gambaran penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan yang terbagi dalam berbagai sub sektornya.